



**PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERBASIS PENGUATAN  
KOMUNITAS PADA WISATA PANTAI TORONIPA KABUPATEN KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Muhammad Amrullah, Takwim**  
**Universitas Lakidende Unaaha**  
**(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

*Abstract*

*This study aims to find out Community Empowerment Based Tourism Development in Toronipa Coastal Tourism Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This study uses a qualitative approach, and the methods used are interviews, observation, and documentation study. The results of this research are to find out what should be done by the Regional Government for the development of tourism in Toronipa Beach, Konawe Regency, Southeast Sulawesi, explored from communication, resources, implementing attitudes and bureaucratic structures. The resource has been implemented and shows a good situation, but in the aspect or dimension of communication, the bureaucratic structure cannot be implemented properly. Factors that influence the implementation of tourism development in Toronipa Beach, Kon Regency are Southeast Sulawesi, is a supporting factor consisting of natural resources, affordability, safety and comfort of tourists and social media technology used for tourism promotion. While the inhibiting factors consist of, local government service factors, limited facilities and infrastructure and supporting facilities for Toronipa beach tourism.*

**Keywords:** *Tourism Development and Community Strengthening.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini untuk mengetahui seperti apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata di Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dieksplorasi dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi) dan sumber daya telah dilaksanakan dan menunjukkan situasi yang baik, tetapi pada aspek atau dimensi komunikasi, struktur birokrasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan pariwisata di Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, adalah faktor pendukung yang terdiri dari sumber daya alam, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan wisatawan dan teknologi media sosial yang digunakan untuk promosi pariwisata. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari, faktor

pelayanan pemerintah daerah, sarana dan prasarana yang terbatas dan fasilitas pendukung wisata pantai Toronipa.

**Kata Kunci :** Pengembangan Pariwisata dan Penguatan Komunitas.

## I. PENDAHULUAN

Pariwisata semakin penting bagi masyarakat di seluruh dunia, kebutuhan untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Komunitas manusia mewakili sumber daya utama yang menjadi tujuan wisata tergantung, dan keberadaan mereka di tempat tertentu dan pada waktu tertentu (Ramos & Jimenez, 2008: 51). Pengembangan potensi pariwisata telah terbukti mampu memberikan dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan peningkatan *income* perkapita dan peningkatan devisa negara.

Kondisi yang demikian harus diikuti dengan kemampuan untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata, apalagi dalam merespon program masyarakat ekonomi asean (MEA) tersebut, sebagai suatu yang sangat potensial yang dapat memberikan alternatif lain sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah dan dibutuhkannya *global skill*, dengan potensi ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan yang besar untuk menciptakan peluang dan kesempatan kerja baru dalam kegiatan ekonomi dengan salah satu teknik penguasaan *global skill* (bahasa asing). Sebab penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata Indonesia, (Zulia & Yanuwiadi (2015).

Selain fenomena konseptual tersebut diatas, juga mempertimbangkan fenomena faktual yang ada di daerah Kabupaten Konawe, yang mana terdapat 4 (empat) obyek wisata (jenis agrowisata, wisata alam, dan wisata budaya) yang dikembangkan pemerintah daerah salah satunya adalah pantai Toronipa (wisata alam). Permasalahan pariwisata tersebut di Kabupaten Konawe dapat diasumsikan bahwa sebagai tantangan dalam usaha mengembangkan pariwisata di daerah, mestinya memainkan strategi-strategi yang tepat diantaranya, menggalakkan pariwisata dalam

negeri, di level lokal (daerah), menekan harga, dan menyiapkan tuan rumah yang ramah, artinya ketiga persolan tersebut akan mampu dilaksanakan dengan efektif manakala dapat menggunakan berbagai strategi kebijakan menyangkut pengembangan pariwisata di daerah (lokal).

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang pariwisata khususnya di Pantai Toronipa mengenai kontribusinya terhadap PAD selama 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017) yaitu tahun 2016 dari target Rp 80.780.000,- realisasi sebesar Rp. 63.700.000, kemudian pada tahun 2017 dari target Rp 100.780.000,- realisasi sebesar Rp 82.350.000. Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang menyangkut dengan pengelolaan pariwisata belum didukung berbagai pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe. Dengan fenomena faktual dan teoritis tersebut diatas, disandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa, strategi kebijakan atau program pengembangan komunitas dalam kepariwisataan kabupaten Konawe belum diketemukan khususnya yang akan menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini.

Permasalahan yang di dapat adalah belum ada desain perencanaan yang matang

dilakukan oleh pemerintah daerah baik berupa anggaran dan desain pariwisata yang unggulan, komitmen mengenai rencana induk pengembangan kepariwisataan baik berupa anggaran dan lain aspek lainnya, mengenai regulasi kepariwisataan, tidak adanya desain yang bagus dari pemerintah daerah, masih lemahnya tingkat komitmen untuk pengembangan kepariwisataan yang difokuskan pada penguatan komunitas, belum adanya strategi yang ampuh dalam penguatan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Atas dasar persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji melalui penelitian dengan topik “Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Konsep Pariwisata**

Konsep dan definisi tentang pariwisata, wisatawan serta klasifikasinya perlu ditetapkan dikarenakan sifatnya yang dinamis. Dalam kepariwisataan menurut Leiper dalam Ismayanti et.al (2011: 1-3) terdapat tiga elemen utama yang membuat kegiatan tersebut biasa terjadi. Kegiatan wisata terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen-komponen tersebut antara lain : Wisatawan, Ele-

men geografi, Daerah Asal Wisatawan (DAW), Daerah Transit, Daerah Tujuan Wisata, dan Industri Pariwisata.

## **2.2 Strategi Pengembangan Pariwisata**

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Strategi perkembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak- pihak tertentu.
2. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman

pada beberapa daerah tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar.

3. Kegiatan promosi harus beraneka ragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program *Visit Indonesia Year* seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan membentuk system informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat informasi pada Negara – Negara lain terutama pada Negara yang berpotensi.
4. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan system terbuka, jujur dan adil. Kerja sama ini penting karena untuk mempelancar pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai.
5. Mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang - peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi.

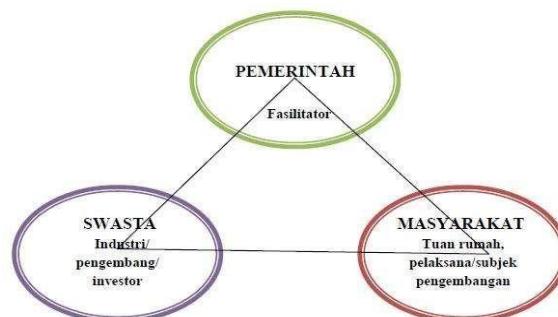
6. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Misalnya dengan pengadaan perbaikan jalan, telepon, internet dan pusat pembelanjaan disekitar lokasi daerah wisata.

### **2.3 Pengembangan Pariwisata Berbasis Penguatan Komunitas**

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di lokasi yang menjadi tujuan (destinasi) wisata melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013: 215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), biasanya

mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam, pariwisata yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata Sumber : Sunaryo (2013:217)

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua *stakeholder* lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya

pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy (1988), Larry Dwyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013:219) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis penguatan komunitas merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis penguatan komunitas berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis penguatan komunitas, yaitu:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo, 2013:140).

#### **2.4 Road Map Penelitian**

Pengembangan Kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat haruslah berdasarkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat berdampak secara efektif. Berdasarkan kajian teoritik penelitian ini, maka peneliti membuat *road map* penelitian untuk memudahkan arah dan tersistematisnya penelitian ini. Berikut *road map* penelitian.

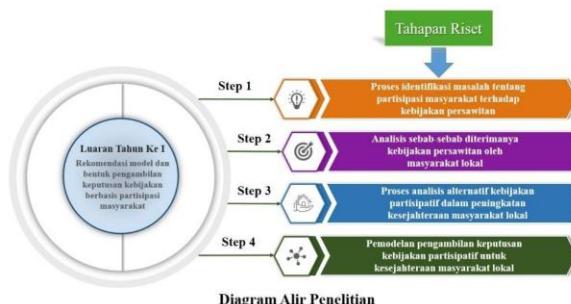


### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Diagram Alir Penelitian**

Penelitian untuk tahun pertama diarahkan pada identifikasi proses, bentuk dan pemaknaan pengembangan kepariwisataan serta merekomendasikan alternatif kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara melalui metode pengumpulan data penelitian yang telah ditentukan (seperti wawancara, observasi, dan studi do-

kumen). Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian signifikansi penelitian yang terukur maka peneliti membuat secara ringkas diagram alir penelitian sebagai berikut.



#### **Lokasi, Desain dan Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan mencari kedalaman informasi secara naturalistik (Patton, 2002); dan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Taylor, Bogdan, & De Vault, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini sebagai pengungkapan makna atas fenomena politik dari data-data deskriptif yang dilakukan secara naturalistik sehingga akan memberikan pemahaman secara konseptual-teoritis dan empirik. Adapun yang menjadi obyek atau fokus penelitian adalah masyarakat lokal mengenai Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas.

## **Unit Analisis dan Penentuan Informan**

### **1. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini ialah individu dan kelompok yang terlibat dalam proses Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas. Perspektif *powercube* dilihat dalam konteks perilaku aktor dalam Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas di Pantai Toronipa Kabupaten Konawe.

### **2. Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan menggunakan *snowball method* (Taylor et al., 2016: 47). Selanjutnya peneliti mengumpulkan data tentang beberapa anggota populasi sasaran yang dapat ditemukan, kemudian meminta orang-orang tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menemukan anggota lain terhadap orang-orang yang mereka ketahui.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti akan bertanya secara mendalam kepada informan tentang fakta-fakta dan opini tentang kejadian tertentu. Selanjutnya pada situasi tertentu, peneliti akan meminta informan untuk mengajukan pandangannya sendiri

tentang Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Penguatan Komunitas.

#### **b. Pengamatan**

Peneliti akan melakukan *direct observation* di lokasi penelitian. Peneliti secara langsung akan merekam kejadian dan fenomena yang terlihat di lapangan dengan menggunakan peralatan berupa media alat perekam, kamera, video, alat tulis yang dilengkapi dengan pedoman pengamatan (*observation guide*).

#### **c. Studi Dokumen**

Studi dokumen digunakan juga untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang penelitian yang akan dilakukan, seperti gambaran umum lokasi penelitian. Dan studi dokumen terhadap berbagai macam dokumen seperti buku-buku, laporan penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, dan brosur yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

#### **Metode Analisis Data**

Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 10) yaitu *data collection, data display, data condensation, and conclusions*. Analisis data dimulai pengumpulan data yang terdiri

dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan dengan transkrip hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi. Dilanjutkan dengan meringkaskan dan memilah data hasil wawancara dan data hasil observasi serta menyisihkan data yang tidak relevan sampai pada penarikan kesimpulan.

### **Luaran dan Target Capaian**

Adapun luaran dan target capaian dalam penelitian ini adalah hasil penelitian akan diterbitkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi ber ISSN (Media Online). Ganaya pada Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (terindeks google scholar), yang dapat memperkaya referensi tentang pengembangan kepariwisataan berbasis penguatan komunitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **IV. HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Pantai Toronipa Kabupaten Konawe**

Pelaksanaan pembangunan di kabupaten konawe pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan pengelolaan sumber daya alam seoptimal mungkin serta pengelolaan sumber-sumber perekonomian lainnya, baik

melalui sumberdaya alam, manusia maupun sumber-sumber keunikan daerah dalam hal ini adalah kepariwisataan. Dalam konsep kepariwisataan pada perspektif pembangunan sesungguhnya diarahkan agar dapat berperan aktif bersama sektor lainnya, khususnya dalam menjawab agenda prioritas yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya serta mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan yang bersumber pada ekonomi kerakyatan.

Diantara implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain adalah *disposition* (sikap pelaksana), *communication* (komunikasi), *bureaucracy structure* (struktur birokrasi) dan *resources* (sumberdaya). yang uraiannya adalah sebagai berikut:

#### **1. *Disposition* (sikap pelaksana)**

Sikap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksana kebijakan yang harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*). Dengan terpenuhinya berbagai kompetensi tersebut, maka hal yang mendukung dan menciptakan sikap pelaksana kebijakan adalah kemu-

dahan dalam pelayanan dan implementasi kebijakan. Kemudahan yang akan terjadi dari adanya kapabilitas, kemampuan, komitmen, dan konsistensi adalah pelayanan administratif dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengelola wisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah yang ada di area wisata. pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya dalam mempermudah akses wisata dan kunjungan wisata pada suatu obyek wisata tertentu. Terkait kemudahan secara administratif yang ada di wisata pantai Toronipa diantaranya adalah pembuatan izin usaha pariwisata, penataan obyek wisata, perbaikan sarana transportasi, dan penyediaan fasilitas wisata.

Pembuatan izin usaha pariwisata yang dimaksud ini adalah kemudahan administratif yaitu suatu pelayanan publik yang disediakan pemerintah dalam upaya memberikan sertifikasi terhadap keberadaan suatu pariwisata. Manfaat dari sertifikasi ini membuat para pelaku usaha pariwisata mendapatkan legalitas dan kepercayaan di masyarakat. Manfaat dari sertifikasi ini pelaku usaha pariwisata mendapatkan legalitas, lebih dipandang masyarakat, lebih leluasa dalam memasarkan jasa atau produk yang ditawarkan.

## **2. *Communication (Komunikasi)***

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan yaitu kebijakan tersebut harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung-jawab untuk melaksanakan-nya dengan jelas, dan tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh para pelaksana. Item yang terkait dalam konsep ini diantaranya adalah kegiatan komunikasi dalam promosi wisata dan kegiatan melakukan penertiban keamanan dan karcis kepada setiap pengunjung pada obyek wisata. Uraian mengenai hal komunikasi tersebut antara lain adalah: Upaya melakukan promosi wisata merupakan kegiatan mengkomunikasikan program yang perlu mendapatkan skala prioritas, karena dengan promosi suatu potensi daerah dengan obyek wisatanya tidak hanya dikenal masyarakat wilayah itu sendiri tetapi juga dikenal masyarakat di luar provinsi bahkan warga mancanegara. Berdasarkan data penelitian menunjukan bahwa dokumen kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe telah menetapkan beberapa kebijakan/program diantaranya promosi wisata, seperti pameran pembangunan,

sosialisasi program sadar wisata, melakukan festival seni dan budaya kearifan lokal.

### **3. Bureaucratic Structures (Struktur Birokrasi).**

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung-jawab yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan, adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadinya ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Kegiatan struktur birokrasi ini dimaksudkan sebagai upaya dalam melaksanakan kebijakan pelatihan keterampilan terhadap pelaku usaha pariwisata. Pelatihan ini bertujuan agar pariwisata dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pengunjung seperti masalah akomodasi, penjelasan tentang substansi dan hal yang menarik dari obyek wisata yang bersangkutan, masalah akses dan sebagainya. Berdasarkan data penelitian diperoleh bahwa hampir setiap tahun dinas ini mengundang para pelaku wisata untuk hadir mengikuti pelatihan bagaimana menjadi pelaku wisata yang baik dan secara ekonomis menguntungkan. Jika dilihat seberapa besar kontribusi sektor ini

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Besarnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Konawe Selama Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	RP. 80.780.000	Rp 63.700.000
2.	2017	Rp 100.780.000	Rp 82.350.000

*Sumber Data: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan, Data Primer yang diolah, Tahun 2018.*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah kontribusi dari tahun ke tahun dari sektor pariwisata menunjukkan penurunan yang relatif kurang menggembirakan.

### **4. Resources (Sumberdaya)**

Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup orang-orang yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, informasi yang jelas, prasarana dan sarana serta wewenang. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dilihat dari jumlah sumberdaya yang dimaksud sudah sangat memadai baik dari aktor pegawai yang ada pada dinas pemuda, olahraga dan pari-

wisata dalam hal ini badan yang menangani urusan kepariwisataan daerah sudah sangat memadai hal tersebut ditandai dengan jumlah personil pegawai yang berjumlah 31 orang tersebut, rata-rata telah mengetahui tugas dan fungsinya dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

Semua pegawai yang ada pada dinas dengan jumlah 31 orang tersebut diberi bekal atas dasar pengenalan potensi kepariwisataan yang ada, penekanan atas penguasaan tugas dan fungsi pegawai dan dengan demikian apabila para pelaksana kebijakan mengata-hui hal yang harus dilakukan, maka implementasi kebijakan di bidang kepariwisataan dapat terlaksana dengan baik. Secara konseptual memang sumberdaya dalam hal ini manusia dapat menentukan suatu kebijakan di dalam organisasi dapat terimplementasi. Karena dengan kualitas masyarakat yang profesional, pembangunan disuatu daerah mudah dilaksanakan. Pembangunan masyarakat adanya tenaga-tenaga pelaksanaan yang berkualitas. Salah satu cara yang paling tepat untuk menciptakan manusia yang berkualitas adalah melalui jalur-jalur pendidikan baik formal ataupun non formal. Pendidikan sangat dibutuhkan apalagi sekarang (saat ini) adalah era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan tek-

nologi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, didalami dari aspek komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi) dan sumberdaya sudah diimplementasikan dan menunjukkan keadaan yang baik, tetapi pada aspek atau dimensi komunikasi, struktur birokrasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun saran yang dikemukakan antara lain agar terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan baik itu persoalan kebijakan dan pelayanan publik di sektor-sektor potensial, perbaikan sarana dan prasarana jalan dan penyediaan fasilitas penunjang pariwisata dari pemerintah daerah, koordinasi dengan instansi terkait, dan pemerintah daerah dan pejabat legislatif diharapkan terjun langsung berkomunikasi dengan orang-orang

yang berada di lapangan, ke tempat-tempat strategis yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan/program yang hendak dibuatnya, Bagi pengelola wisata, dalam mengelola obyek wisata hendaknya lebih memerhatikan kebersihan dan keberlanjutan wisata tanpa lebih mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah, meningkatkan rasa memiliki wisata bersama yang berkelanjutan, memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan lokal sehingga pada akhirnya pantai toronipa akan mudah dikenal dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aviyanti, Zulia. 2015. *Validitas LKS Berorientasi 5M Materi Perubahan Lingkungan Dan Daur Ulang Limbah Untuk Melatihkan Siswa Memecahkan Masalah*. BioEdu. Vol. 4(1): 816-821
- Allison. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Terjemahan. Faisal Basri. Jakarta: Yayasan Obor.
- Antariksa, Basuki. 2011. *Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisataan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Bilton C. 2007. *Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management*. Oxford: Blakwell Publishing.
- Budiyanto. A. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Pertama: Cetakan Kedua. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakulta Kedokteran UI.
- Bryant, Coralie and Louise G White. 1987. *Managing Development in Third World* Westview. Colorado: Weathview Press, Inc.
- Ismayanti. 2011. *Pengantar Pariwisata*. Jakaarta: Grasindo.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). New York: SAGE Publications, Inc.
- Ramos & Jimenez, Alejandro D & Jimenez, Pablo S. 2008. *Tourism Development: Economics, Management and Strategy*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya* Indonesia, Yogyakarta, Gava Media
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. 2016. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009.  
Tetang Kepariwisataan.

Putri, Dhesitta, Sandra. Soemarno & Hakim, Luchman. 2015. Strategic Management of Nature Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. Vol.3, No.3. Malang: Master Program of Environmental Sciences, Graduate Program, University of Brawijaya.

Wurianto, Arif Budi. 2006. *Evaluasi Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Kota Malang*. Jurnal Ilmiah (disertasi) Lingkup Universitas Padjadjaran, Bandung.

Zulia, Zulfaidha & Yanuwiadi, Bagyo. 2015. The Natural and Cultural Resources for Ecotourism Development in Trenggalek Regency, East Java. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* Vol.3, No.2. Malang: Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Brawijaya.